



Cabut Izin Pedagang Mbalela

JOGJA, BERNAS -- Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mulai bertindak tegas kepada para pedagang yang menaikkan harga tidak wajar. Sanksi tegas tak hanya penutupan warung, namun juga dengan cara pencabutan izin usaha berdagang.

Sejak musim libur lebaran berlangsung, mahalnnya harga makanan lesehan di Malioboro menjadi *trending topic* di sosial media (sosmed). Bahkan banyak yang memplesetkan menjadi Mahalyoboro. Pada hari kedua Lebaran lalu, salah seorang wisatawan memposting nota pembayaran lesehan Intan di Malioboro yang mencapai Rp490 ribu untuk tujuh orang. Dalam postingan tersebut harga empat porsi ayam goreng Rp 120 ribu belum termasuk nasi. Nasinya Rp 8 ribu per porsi. Serta harga nasi goreng mencapai Rp 40 ribu per porsi.

Pihak UPT Malioboro dan komunitas PKL Malioboro sudah memanggil pengelola lesehan Intan dan diberi sanksi tegas. "Tidak boleh berjualan hingga 3 Juli," kata Kepala UPT Malioboro, Syarif Teguh Prabowo, Minggu (2/7).

Menurut Syarif, sanksi tersebut dijatuhkan secara matang dan telah mendapat izin dari Pemkot Yogyakarta. Tidak sampai disitu, UPT bersama Pemkot juga akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait keberadaan PKL Malioboro yang menerapkan harga diluar kewajaran. Jika ada pedagang yang tetap *mbalela*, tidak mengindahkan peringatan, maka terancam sanksi terpahit yaitu berupa pencabutan izin berdagang.

"Nanti akan kita evaluasi. Bisa saja izinnnya kita cabut," tegas Syarif.

Syarif melihat yang dilakukan pengelola lesehan Intan sebenarnya bukan *nuthuk* (menaikkan harga tinggi hingga merugikan konsumen). Sebenarnya sudah mencantumkan daftar harganya. "Hanya saja harga yang dipatok dinilai tidak wajar untuk sekelas lesehan," katanya.

► ke hal 7

Cabut Izin

Sambungan dari hal 1

Syarif mengaku kecolongan dengan tindakan lesehan Intan tersebut, terlebih sebelum Lebaran sudah terus dilakukan sosialisasi pada PKL supaya tidak aji mumpung. "Kami sudah lakukan sosialisasi berulang kali, tangan sampai membuat wisatawan kapok datang lagi," tegasnya.

Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, mengakui jika ada PKL menaikkan harga saat musim lebaran, tapi tetap dalam batas kewajaran. "Ya, kalau sampai diunggah di medsos berarti kan dianggap tidak masuk akal," ujar sosok yang belum lama terpilih sebagai Ketua DPD Partai Golkar DIY, itu.

Selain mahalnnya harga makan di lesehan Malioboro, masalah lain yang juga masih ditemui di Kota Yogyakarta terkait dengan parkir. Sebab ternyata masih ditemui juru parkir yang menerapkan tarif diluar ketentuan.

Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Purwadi, mengatakan setelah masa Lebaran nanti akan segera dilakukan evaluasi, baik secara teknis maupun kebijakan. Secara khusus Heroe menyoroti terkait persoalan parkir dan berharap dalam Raperda Perparkiran yang sedang dibahas di DPRD Kota Yogyakarta sudah termasuk mengatur terkait tarif. Menurut dia, hal itu penting supaya pada libur Idul Adha dan akhir tahun nanti tidak ada lagi keluhan serupa. "Sehingga dengan Perda itu nanti tidak ada lagi keragu-raguan jika akan menindak," pintanya.

Heroe mengatakan saat ini warga Kota Yogyakarta termasuk wisatawan yang makin kritis. Dengan adanya medsos, setiap ada pelanggaran bisa langsung dilaporkan dan bahkan menjadi viral.

"Tidak hanya warga Yogyakarta dan Indonesia saja, tapi seluruh dunia bisa membacanya. Nah, kontrol sosial itu sangatlah kuat. Jadi, munculnya keluhan itu yang harus dihindarkan, biar kebaikan Kota Yogyakarta yang menjadi viral," tandas sosok yang juga menjabat Ketua DPD PAN Kota Yogyakarta itu. (age)

Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Dieng Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Surip, mengatakan letusan freatik itu terjadi pada pukul 12.00 WIB.

Tinggi letusan mencapai 50 meter, sampai ke parkir 'waterboom'. Tidak ada korban jiwa akibat letusan itu, katanya.

Kendati demikian, dia mengakui jika saat kejadian ada 10 wisatawan di sekitar Kawah Sileri. Dia menjelaskan 10 wisatawan tersebut terkena lumpur tetapi kondisinya tidak parah dan saat ini mendapat perawatan di Puskesmas Batur.

Surip mengatakan PVM-BG sejak 24 Juni 2017 telah merekomendasikan radius bahaya hingga 100 meter. "Dengan kejadian ini, kami belum mengetahui apakah radius bahaya akan diperluas. Tergantung dari pusat, kami masih mengumpulkan data," katanya.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan

Tindak Lanjut

Untuk Ditanggapi

Untuk Diketahui

Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Malioboro	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005